

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BATU BARA

Valentino Partogi Siagian

NPP. 30.0155

Asdaf Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: siagianvalentino7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of road infrastructure development that is still uneven in Batu Bara Regency. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the Implementation of Road Infrastructure Development Policy in Improving Economic Growth in Batu Bara Regency, along with inhibiting factors and also efforts made to overcome obstacles to policy implementation. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the Implementation of the Road Infrastructure Development Policy in Increasing Economic Growth in Batu Bara Regency as stated in the RPJMD has generally run well. This can be seen from the fulfillment of the dimensions or theories used in the research results, namely that the communication carried out has been running well, clearly and consistently; the resources owned are also sufficient and adequate; the disposition or attitude of the policy implementor supports the running of the policy; and the bureaucratic structure in policy implementation has gone well because policy implementation is in accordance with the SOP and a clear division of responsibilities. In addition, the development carried out is in accordance with the goals, objectives and programs contained in the RPJMD. **Conclusion:** Communication in the Implementation of Road Infrastructure Development Policy in Increasing Economic Growth in Batu Bara Regency which is viewed from indicators of transmission, clarity, and consistency is considered to have gone well. This can be seen from the distribution of communication to both policy implementers and target groups that is going well and the communication that is carried out is effective. Resources Implementation of Road Infrastructure Development Policy in Increasing Economic Growth in Batu Bara Regency which is seen from indicators of human resources, information resources, authority resources, and facility resources. In human resources, it can be said that it is quite good because it has a sufficient number of employees and adequate abilities. Then the authority resources can also be said to be good because the authority or authority possessed is clear and has been implemented as it should. However, facility resources are still lacking because there is still a shortage in the number of heavy equipment owned. However, this can be overcome by renting heavy equipment with third parties.

Keywords: Economic Growth, Policy Implementation, Road Infrastructure Development

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang pembangunan infrastruktur jalan yang masih belum merata di Kabupaten Batu Bara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batu Bara, beserta faktor penghambat dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam RPJMD secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dimensi atau teori yang digunakan terhadap hasil penelitian, yaitu komunikasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten; sumber daya yang dimiliki juga sudah mencukupi dan memadai; disposisi atau sikap yang dimiliki implementor kebijakan mendukung berjalannya kebijakan; dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik karena implementasi kebijakan sudah sesuai dengan SOP serta pembagian tanggungjawab yang jelas. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran dan program yang terdapat dalam RPJMD. **Kesimpulan:** Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batu Bara yang ditinjau dari indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran komunikasi baik kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran yang berjalan dengan baik serta komunikasi yang dilakukan sudah efektif. Sumber daya Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batu Bara yang dilihat dari indikator sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya wewenang, dan sumber daya fasilitas. Pada sumber daya manusia bisa dikatakan cukup baik karena telah memiliki jumlah pegawai yang mencukupi dan kemampuan yang memadai. Kemudian pada sumber daya wewenang juga bisa dikatakan baik karena wewenang atau otoritas yang dimiliki sudah jelas dan telah dilaksanakan sesuai dengan sebagaimanamestinya. Namun, untuk sumber daya fasilitas masih kurang karena masih terdapat kekurangan pada jumlah alat berat yang dimiliki. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menyewa alat berat dengan pihak ketiga. **Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertumbuhan Ekonomi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang telah menerapkan pembangunan berbasis pengembangan wilayah sejak lama. Strategi pengembangan wilayah Indonesia telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan dijabarkan kedalam dokumen-dokumen Perencanaan nasional seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Masing-masing kementerian/lembaga harus mengacu pada kebijakan-kebijakan tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Infrastruktur merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus berkesinambungan dengan tujuan untuk Meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual. Keberadaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan aspek penentu dalam membentuk struktur dan pola ruang suatu wilayah, termasuk mendorong pembangunan daerah dan pengembangan suatu kawasan. Keterpaduan adalah faktor penting dalam pengembangan wilayah,

yang meliputi keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemerintah. Salah satu tantangan pembangunan di Indonesia adalah bahwa masih terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh belum meratanya pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana pembangunan infrastruktur masih terkonsentrasi di Pulau Sumatera. Selain belum meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah, pembangunan infrastruktur saat ini juga masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya keterpaduan pembangunan antar sektor sehingga keberadaan infrastruktur tersebut belum dapat berfungsi secara optimal. Misalnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan infrastruktur tentu saja memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena selain membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak sehingga memberikan sumber penghasilan masyarakat, pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan jalan dapat membuka isolasi daerah baru sehingga potensi daerah bisa dikembangkan. Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil kebijakan fiskal dengan mendistribusikan Rp 695,2 triliun dana dari APBN dalam upaya pemulihan ekonomi. Diakui bahwa dalam realisasinya, asas-asas dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah belum dapat diimplementasikan dengan baik sehingga belum terdapat adanya hubungan antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan penganggaran pada setiap daerah. Hal tersebut antara lain terlihat dari beberapa program di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum dilakukan perencanaan dan penganggaran yang konsisten mulai dari RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan jalan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara sendiri terdiri dari beberapa jenis permukaan seperti aspal, kerikil, tanah dan permukaan lain. Jenis permukaan jalan yang paling banyak di Kabupaten Batu Bara adalah permukaan jalan aspal dimana permukaan jalan aspal merupakan jenis permukaan jalan yang paling bagus dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat. Namun, di Kabupaten Batu Bara sendiri masih terdapat jenis permukaan jalan yang kurang baik seperti permukaan jalan kerikil dan tanah. Kondisi jalan di Kabupaten Batu Bara memiliki kondisi yang mantap. Hal ini dibuktikan dengan lebih banyak jalan yang memiliki kondisi yang baik dan sedang dibandingkan jalan yang memiliki kondisi rusak dan rusak berat. Namun, memang masih terdapat jalan yang rusak dan rusak berat di Kabupaten Batu Bara seperti jalan yang berlubang, retak, distorsi dan kerusakan lainnya. Pada tahun 2019 dan 2020, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara. Industri Pengolahan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 1,59, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan industri ini turun hingga mencapai minus, yakni -0,85. Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah sebesar 1,06, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 0,69. Terjadi penurunan sebesar 0,37 dalam sektor tersebut, pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor terjadi penurunan dari 0,83 menjadi 0,24. Terjadi penurunan sebesar 0,59 pada sektor ini. Selanjutnya pada sektor konstruksi di tahun 2019 pertumbuhannya mencapai 0,40, sedangkan pada tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 0,29. Pada sektor administrasi pemerintahan, tahun 2019 tumbuh sebesar 0,13,

sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 0,01. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup besar, yakni 0,129, hampir 100% dari pertumbuhan awal. Terakhir, pada sektor lainnya terjadi penurunan dari 0,33 ke 0,09 sepanjang tahun 2019 hingga 2020. Selain masalah tersebut, Kabupaten Batu Bara juga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sarana prasarana khususnya dalam infrastruktur seperti keadaan tanah umumnya di Kabupaten Batu Bara tidak stabil yang mengakibatkan cepatnya jalan cepat rusak. Kabupaten Batu Bara adalah daerah pesisir yang sering kali pasang laut yang merendam jalan mengakibatkan jalan cepat rusak serta material tidak tersedia di Kabupaten Batu Bara yang mengakibatkan biaya pengerjaan menjadi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lemah, sumber daya manusia yang rendah, kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta aksesibilitas daerah sangat rendah. Kendala ini tentu berindikasi menghambat pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batu Bara pasca pandemi *COVID-19*. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan-kebijakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi maupun analisis kebijakan pemerintahan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara. Penelitian oleh Muhammad Rezeky, (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Perda Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Musrenbang di Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, menemukan hasil bahwa Target rencana pembangunan desa belum maksimal. Tujuan Musrenbang belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya peran serta masyarakat. Diperlukan adanya keputusan yang menginstruksikan penyelenggaraan Musrenbang. Penelitian oleh Ilham (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar, menemukan hasil bahwa Pengimplementasian Perda No. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan model pengimplementasian kebijakan publik. Penelitian oleh Damopoli (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu), menemukan hasil bahwa Implementasi kebijakana Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelayanan kesehatan gratis belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya. Penelitian oleh Pratama (2019) dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tukjimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Idragiri Hilir, menemukan hasil bahwa Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur didesa Tukjimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri dilakukan dengan Menggunakan transparansi RPJMD dimana pemerintah membuka informasi mulai dari Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan juga pengawasan dalam pembangunan infrastruktur desa Tukjimun dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur diantaranya minimnya keterlibatan masyarakat, kemampuan SDM yang terbatas rendahnya partisipasi masyarakat dalam RPJMD.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Pratama tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan politik pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara, mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan jalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara, mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Batu Bara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan di Kabupaten Batubara.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 9 orang yang diambil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara, Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Seksi Jalan, dan Masyarakat Kabupaten Batubara

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III dalam Abdul Wahab (2001: 90-92). Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor vital dalam menunjang kehidupan, tidak terkecuali dalam komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah penting untuk dilakukan dan diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebagus apapun kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan bisa berhasil jika tidak didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. Mengkomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dilakukan dibandingkan dari sekedar menyosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan artinya mengikutsertakan publik sejak dari pembentukan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan publik bisa dilakukan dengan lancar jika terciptanya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan/program dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan adanya komunikasi yang baik, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari suatu kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga bisa meminimalisir atau bahkan tidak adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Terdapat tiga indikator dalam menganalisis komunikasi yang dilakukan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, terdiri dari penyampaian informasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kepada masyarakat dan juga kepada pegawai yang bertugas. Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan komunikasi yang jelas kepada masyarakat dan pegawai yang bertugas terkait kebijakan pembangunan jalan yang tertuang dalam RPJMD dan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dimana pembangunan jalan ini

berguna untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memberikan informasi terkait ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat apabila ada rumah atau lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan terus menjalin komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi ini juga harus dilakukan dengan jelas agar pemerintah mengetahui dan memahami dengan baik kebutuhan dan keinginan masyarakat agar pembangunan infrastruktur jalan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif. Dengan adanya komunikasi yang jelas, masyarakat juga akan memahami tujuan dan maksud dari pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah. Jadi, dapat dikatakan sebelum membentuk kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat.

3.2. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor terutama kerjasama antar pihak yang terlibat. Ketika struktur birokrasi tidak memiliki hubungan dan kerjasama yang baik, maka akan menyebabkan tidak efektifnya dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi dapat dinilai dari Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi/Penyebaran Tanggungjawab. Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP berisi tentang prosedur yang harus dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan memperoleh hasil kerja yang efektif. Dalam mengimplementasikan kebijakan, dibutuhkan pedoman atau prosedur yang membantu dalam melaksanakan kebijakan tersebut. SOP akan membuat pelaksana kebijakan memahami apa yang harus mereka lakukan dan berguna sebagai panduan pelaksana kebijakan dalam bekerja. Dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Batu Bara, dibutuhkan pembagian tugas dan tanggungjawab yang baik dan harus sesuai dengan bidang masing-masing. Pembagian tanggungjawab yang tidak tepat akan mengakibatkan terhambatnya implementasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan. Selain itu, berhasil tidaknya pembangunan jalan juga dipengaruhi oleh koordinasi yang dilakukan antara pihak yang terlibat.

3.3. Sumber Daya

Sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan merupakan informasi yang berhubungan dengan cara melaksana kebijakan. Kewenangan merupakan asas atau legitimasi yang dimiliki oleh pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu, dibutuhkan juga sumber daya fasilitas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki sumber daya yang memadai dan berkualitas, namun apabila hal tersebut tidak didukung oleh fasilitas yang memadai juga maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dan kualitas yang memadai. Selain itu, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dari kebijakan yang akan dijalankan. Dalam menunjang keberhasilan dan kelancaran pembangunan jalan di Kabupaten Batu Bara yang terdapat pada RPJMD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara telah memiliki sumber daya manusia yang baik dan memadai.

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, wewenang yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara berpedoman pada Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Batu Bara agar berjalan dengan baik,

tersusun secara sistematis, sinergis dan efektif. Dimana pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Batu Bara. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga merupakan salah satu sasaran indikator kerja utama Kabupaten Batu Bara dan juga merupakan perwujudan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040.

3.4. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen yang dimiliki pelaksana kebijakan. Keberadaan pelaksana kebijakan memegang peranan penting dan merupakan penentu keberhasilan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya. Pelaksana kebijakan tidak bisa hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam melaksanakannya. Para pelaksana kebijakan juga harus mendukung dan memiliki sikap positif terhadap implementasi kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Sikap yang dimiliki pelaksana kebijakan baik itu sikap penerimaan atau penolakan memiliki pengaruh besar terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Banyak kasus yang terjadi pada pengambil keputusan tidak memahami bahkan tidak bisa mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Setiap pelaksana kebijakan tentu saja memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu kebijakan. Sikap pelaksana yang bermacam-macam akan memunculkan hambatan yang berdampak pada kelancaran implementasi kebijakan jika pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan tujuang yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan pelaksana kebijakan harus tepat. Pelaksana kebijakan yang dipilih harus memiliki sikap mendukung dan komitmen terhadap kebijakan yang telah dibentuk. Pemberian insentif merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memberi motivasi dan semangat lebih bagi pelaksana kebijakan. Pada umumnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam melakukan pembentukan RPJMD dan pembangunan jalan melakukan penyaluran komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga melakukan diskusi dan komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan pembangunan jalan agar masyarakat juga dapat memahami dan mengerti tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Selain itu, hal ini juga berguna untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan suatu hal yang positif karena dapat mempermudah implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. penyaluran komunikasi mengenai pembangunan infrastruktur jalan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Melalui komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang pembangunan jalan yang dilakukan. Komunikasi yang dijalin pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan lancar dan jarang terjadi konflik ataupun benturan antar pemerintah dengan masyarakat. Pemberian ganti rugi kepada masyarakat merupakan salah satu kebijakan program yang dilakukan guna percepatan penyusunan terkait penataan ruang dan wilayah. Dimana program tersebut adalah Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. Pemberian ganti rugi ini juga dilakukan agar masyarakat yang mengalami penggusuran dapat berjalan dengan adil dan tidak merugikan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan. Sumber daya manusia ini juga saling bekerjasama dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lebih baik. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang per bulan Januari 2022 dalam mendukung terlaksananya implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan adalah sebanyak 45 orang. Dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Batu Bara masih terkendala pada ketersediaan alat berat yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara yang bertanggungjawab dan bertugas dalam pembangunan infrastruktur jalan masih merental atau menyewa kendaraan berat dari pihak ketiga apabila kekurangan alat berat. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses pembangunan jalan karena harus mencari pihak yang merental alat berat dengan harga yang terjangkau dan bisa dipercaya. Selain itu, merental alat berat juga akan memakan banyak biaya jika perentalan dilakukan dalam jangka panjang.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pemerataan pembangunan jalan di Kabupaten Batubara adalah dana yang dimiliki tidak memadai, belum tersedianya alat berat yang memadai dan mencukupi, dan yang terakhir adalah masih susah aksesibilitas dan mobilitas di wilayah terpencil

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Batubara dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batu Bara yang ditinjau dari indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran komunikasi baik kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran yang berjalan dengan baik serta komunikasi yang dilakukan sudah efektif. Sumber daya Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batu Bara yang dilihat dari indikator sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya wewenang, dan sumber daya fasilitas. Pada sumber daya manusia bisa dikatakan cukup baik karena telah memiliki jumlah pegawai yang mencukupi dan kemampuan yang memadai. Kemudian pada sumber daya wewenang juga bisa dikatakan baik karena wewenang atau otoritas yang dimiliki sudah jelas dan telah dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Namun, untuk sumber daya fasilitas masih kurang karena masih terdapat kekurangan pada jumlah alat berat yang dimiliki. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menyewa alat berat dengan pihak ketiga.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengumpulan data dan informasi penelitian sehingga data dan informasi masih belum bisa melengkapi keseluruhan dari aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Batu Bara, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Syafri, W. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Alqaprint. Tumbuh 5,44 Persen (y-on-y).
- Abdul Wahab, Solichin. (2001). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilham. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosialdi Kota Makassar*.
- Damopoli, R. V. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Mobagu)*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1168.
- Rezky, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Perda Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Musrenbang Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara*. Doctoral dissertation.
- Pratama, A., DA PRATAMA, S. I. P., Yuliatin, Y., & Lestiyani, T. E. K. (2019). *ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI DESA TUK JIMUN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN IDRAGIRI HILIR* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).